



Transformasi Sosial-Politik Dakwah Nabi Muhammad: Analisis Sosio-Historis Mekah-Madinah

Andi Alif Afwan^{1*}, Amrudin², Susmihara³, Syamzan Syukur⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: aawanandialif30@gmail.com¹, amruddintsm9@gmail.com², susmihara.uin-alauddin.ac.id³, syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. Studies on the Prophet Muhammad's da'wah commonly approach the Meccan–Medinan period through normative-theological perspectives or descriptive historical narratives, leaving the socio-political dimension of transformation and its relevance to contemporary leadership insufficiently explored. This article aims to analyze the transformation of the Prophet Muhammad's da'wah from Mecca to Medina as a process of socio-political change using a socio-historical approach. This study employs qualitative library research, drawing on primary sources such as the Qur'an, hadith, and classical sirah literature, as well as secondary sources from contemporary scholarly works. Data are analyzed descriptively and analytically by reconstructing historical contexts and examining shifts in social structures, power relations, and prevailing values in Meccan and Medinan society. The findings reveal that the Meccan da'wah functioned as a moral and social transformation movement that challenged tribalism, social inequality, and the legitimacy of the Quraysh elite, while simultaneously laying the ideological foundation of the early Muslim community. This transformation reached its institutional form in Medina through the formation of a plural and organized political community, as reflected in the Charter of Medina. The study argues that the success of the Prophet's da'wah was not solely religious but also socio-political, embodied in a model of prophetic leadership grounded in moral exemplarity, consultation (*shura*), justice, and social compassion. This article contributes to socio-political Islamic studies by offering a socio-historical interpretation of prophetic da'wah and highlighting its relevance for contemporary leadership and governance.

Keywords: Social Transformation, Prophetic Da'wah, Madinan State, Prophetic Leadership

Abstrak: Kajian tentang dakwah Nabi Muhammad Saw. umumnya menempatkan peristiwa Mekah–Madinah dalam kerangka normatif-teologis atau narasi sejarah deskriptif, sehingga aspek transformasi sosial-politik dan relevansinya bagi kepemimpinan kontemporer belum dianalisis secara memadai. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi dakwah Nabi Muhammad Saw. dari Mekah ke Madinah sebagai proses perubahan sosial-politik dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik sirah nabawiyah, serta sumber sekunder berupa kajian akademik kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan merekonstruksi konteks historis dan mengkaji perubahan struktur sosial, relasi kekuasaan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Mekah dan Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Nabi di Mekah berfungsi sebagai gerakan transformasi moral dan sosial yang menggugat struktur kesukuan, ketimpangan sosial, dan legitimasi elit Quraisy, sekaligus membangun fondasi ideologis komunitas Muslim. Transformasi tersebut mencapai bentuk institusional di Madinah melalui pembentukan masyarakat politik yang plural dan terorganisasi, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah.

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; Online Available: August 29, 2024; Published: August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah Nabi tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial-politik, dengan model kepemimpinan profetik yang berlandaskan keteladanan, musyawarah, keadilan, dan kedulian sosial. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan kajian sosial-politik Islam dengan menawarkan pembacaan sosio-historis atas dakwah Nabi serta relevansinya bagi pengembangan konsep kepemimpinan dan tata kelola masyarakat kontemporer.

Kata kunci: *Transformasi Sosial; Dakwah Nabi Muhammad Saw.; Negara Madina; Kepemimpinan Profetik.*

LATAR BELAKANG

Sejarah dakwah Nabi Muhammad Saw. merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan umat manusia, khususnya dalam pembentukan peradaban Islam. Proses dakwah yang bermula dari kota Mekah dengan berbagai rintangan dan tantangan, hingga akhirnya terwujud dalam bentuk sebuah komunitas politik di Madinah, menjadi bukti nyata transformasi sosial dan politik yang fundamental. Transformasi ini tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan tatanan pemerintahan.

Pertama, dakwah Rasulullah di Mekah membawa perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat Quraisy. Sebelum Islam hadir, struktur sosial Quraisy didominasi oleh sistem kesukuan, hierarki yang kaku, serta praktik sosial yang sarat dengan ketidakadilan, seperti diskriminasi terhadap budak dan perempuan. Ajaran Islam yang menekankan kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan sosial secara perlahan mengguncang tatanan lama. Walaupun mendapat perlawanan keras dari kaum elit Quraisy, nilai-nilai yang dibawa Rasulullah berhasil menanamkan benih perubahan dalam pola pikir sebagian masyarakat Mekah(Kamila et al., 2025).

Kedua, momentum hijrah ke Madinah menjadi tonggak baru dalam perjalanan dakwah Nabi. Di kota ini, Islam tidak hanya dipraktikkan sebagai ajaran moral dan spiritual, tetapi juga sebagai dasar bagi sebuah tatanan sosial-politik Madinah tampil sebagai basis negara Islam pertama, dengan Piagam Madinah sebagai fondasi hukum yang mengatur kehidupan bersama antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok lain. Kehidupan masyarakat yang semula diwarnai konflik antarsuku berhasil dipersatukan dalam sebuah visi bersama, yakni membangun komunitas yang berlandaskan keadilan, toleransi, dan

persaudaraan(Azizah & Yudhistira, 2025).

Ketiga, model kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. yang tercermin dalam transformasi dakwah dari Mekah ke Madinah tentunya masih tetap relevan untuk masa kini. Kepemimpinan beliau tidak hanya bersandar pada otoritas spiritual, tetapi juga pada prinsip musyawarah, keadilan, dan keteladanan. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi problematika sosial-politik, khususnya dalam mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama(Rizqi & Alamudi, 2025).

Dengan demikian, kajian tentang transformasi sosial dan politik dakwah Nabi dari Mekah ke Madinah, baik dari sisi historis maupun sosiologis, sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bukan hanya untuk memahami perjalanan sejarah Islam, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai yang relevan dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis proses transformasi dakwah Nabi Muhammad Saw. dari Mekah ke Madinah dengan menempatkannya dalam konteks sejarah serta dinamika sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam.

Data penelitian bersumber dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur sirah nabawiyah, serta sumber sekunder berupa artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema perubahan sosial, pembentukan Negara Madinah, dan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan merekonstruksi peristiwa historis dan menganalisis perubahan struktur sosial, relasi kekuasaan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Mekah dan Madinah. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menafsirkan makna transformasi sosial-politik dakwah Nabi serta relevansinya terhadap konteks kepemimpinan dan kehidupan sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERUBAHAN SOSIAL QURAISY AKIBAT DAKWAH RASULULLAH SAW

Kehadiran dakwah Rasulullah Saw. di Mekah membawa dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat Quraisy yang selama berabad-abad hidup dengan sistem nilai, struktur sosial, dan tradisi yang mapan. Sebelum Islam hadir, masyarakat Quraisy berada dalam kondisi yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai jahiliyyah, yakni suatu tatanan yang ditandai dengan dominasi fanatisme kesukuan, ketidakadilan sosial, serta praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia. Dalam sistem ini, stratifikasi sosial terbentuk berdasarkan garis keturunan, status ekonomi, dan kekuasaan politik(Saepuloh et al., 2025). Kaum elit Quraisy, seperti Bani Umayyah dan Bani Makhzum, mendominasi kehidupan ekonomi, khususnya dalam perdagangan lintas negeri, sementara kelompok budak, perempuan, dan orang- orang lemah berada pada posisi marginal tanpa hak yang jelas.

Dakwah Nabi Muhammad Saw. sejak awal menekankan berbagai poin penting, seperti Tauhid, mempercayai hari kiamat sebagai hari pembalasan, mengajak manusia untuk menyucikan jiwa, serta pesan untuk memperkokoh persatuan dan persaudaraan. Seruan ini mengguncang berbagai fondasi keagamaan masyarakat Mekah yang mana mereka selama ini bertumpu pada pemujaan berhala di sekitar Ka'bah(Wahdania & Rahmawati, 2025). Ajaran tauhid tidak hanya menegasikan legitimasi spiritual para pemimpin Quraisy, tetapi juga menggugat otoritas sosial mereka yang terbangun atas dasar status penjaga Ka'bah dan pengelola ritual keagamaan. Hal ini menimbulkan resistensi keras dari kalangan elit Quraisy, karena mereka merasa terancam baik secara teologis maupun ekonomis.

Selain dimensi teologis, dakwah Nabi juga menyentuh aspek sosial yang sangat mendasar. Rasulullah memperkenalkan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt., tanpa memandang suku, status, atau kedudukan sosial. Prinsip ini menabrak struktur sosial Quraisy yang hirarkis(Arzam, 2016). Tidak mengherankan jika banyak pengikut awal Islam justru berasal dari kalangan

marjinal, seperti Bilal bin Rabah yang seorang budak, atau Ammar bin Yasir dari golongan lemah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dakwah Rasulullah mengangkat martabat mereka yang sebelumnya termarjinalisasi, sekaligus menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok elit yang terbiasa memegang kendali.

Lebih jauh, Islam mengajarkan nilai persaudaraan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an mengecam praktik riba, penindasan, dan penimbunan kekayaan yang menjadi ciri dominan kelas pedagang Quraisy. Dengan demikian, dakwah Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berupa seruan spiritual, tetapi juga membawa kritik sosial terhadap praktik ekonomi yang eksplotatif dan menindas. Hal ini memberi tekanan moral bagi para pedagang Quraisy yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang.

Perubahan sosial akibat dakwah Rasulullah juga tampak pada pola hubungan antarkelompok. Jika sebelumnya fanatisme kesukuan menjadi dasar solidaritas, maka Islam menggeser orientasi solidaritas tersebut kepada persaudaraan iman (*ukhuwah islamiyyah*). Identitas baru ini mempertemukan individu dari berbagai suku dalam satu ikatan keagamaan, yang secara perlahan mengikis superioritas kabilah sebagai identitas utama. Proses ini pada akhirnya membuka jalan bagi terbentuknya komunitas yang lebih inklusif dan universal, yang kelak menemukan bentuk lebih konkret setelah peristiwa hijrah ke Madinah(Kamila et al., 2025).

Meskipun demikian, transformasi sosial ini tidak terjadi tanpa konflik. Penolakan keras dari para pemimpin Quraisy, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, menunjukkan betapa dakwah Nabi Muhammad Saw. dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang sudah mapan. Perlawanan yang berujung pada intimidasi, penyiksaan, dan embargo ekonomi terhadap kaum Muslimin justru semakin mempertegas adanya pertarungan ideologis antara nilai-nilai jahiliyyah dan ajaran Islam. Konflik ini sekaligus menunjukkan bahwa perubahan sosial yang diusung oleh dakwah Nabi bersifat revolusioner, karena menyasar langsung pada akar-akar ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang mengakar dalam masyarakat Quraisy(Hidayatulloh, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah Rasulullah Saw. di Mekah memicu proses perubahan sosial yang fundamental. Dari masyarakat yang terbelenggu fanatisme kesukuan, ketidakadilan, dan diskriminasi, Islam menghadirkan visi baru tentang masyarakat yang egaliter, berkeadilan, dan berlandaskan tauhid(Azzahra et al., 2025). Walaupun mendapat tentangan keras, nilai-nilai tersebut tetap mengakar dalam komunitas Muslim awal, yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial-politik baru di Madinah.

Madinah sebagai Basis Negara Islam

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ﷺ dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam, karena menandai perubahan dari dakwah yang masih bersifat spiritual dan terbatas menjadi gerakan sosial-politik yang terorganisasi. Sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat hidup dalam tekanan berat(Rahmatulloh et al., 2025). Kaum Quraisy melakukan berbagai bentuk penindasan, mulai dari ejekan, pemboikotan ekonomi, hingga penyiksaan fisik terhadap pengikut yang lemah. Meskipun Islam sudah mulai mengakar di kalangan masyarakat Mekah, kondisi sosial-politik tidak memungkinkan bagi dakwah untuk berkembang lebih jauh.

Peluang baru muncul ketika sekelompok penduduk Yatsrib—yang kemudian dikenal sebagai Madinah—menerima Islam dan menyatakan kesetiaan kepada Nabi melalui Baiat Aqabah Pertama (621 M) dan Baiat Aqabah Kedua (622 M). Dukungan ini bukan hanya spiritual, tetapi juga politis, sebab mereka berjanji melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi keluarga sendiri. Baiat Aqabah Kedua secara khusus menjadi fondasi bagi terbentuknya komunitas politik Islam, karena mengandung unsur perjanjian sosial yang mirip dengan kontrak politik(Huda & Hasyim, 2020).

Setelah baiat tersebut, Nabi ﷺ mengizinkan para sahabat berhijrah terlebih dahulu ke Yatsrib. Gelombang hijrah ini berlangsung bertahap. Kehadiran para sahabat di Yatsrib semakin memperkuat embrio komunitas Muslim yang kelak menjadi kaum Anshar (penduduk asli Madinah yang menerima Islam) dan kaum Muhibbin (Muslim Mekah yang hijrah).

Nabi sendiri baru berhijrah setelah Quraisy merencanakan pembunuhan

terhadap beliau. Dengan strategi cermat, Nabi keluar dari Mekah bersama Abu Bakar as-Shiddiq r.a., bersembunyi di Gua Tsur selama tiga hari, lalu melanjutkan perjalanan ke Yatsrib dengan penuh kewaspadaan. Hijrah ini bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga peralihan basis perjuangan: dari kondisi tertekan di Mekah menuju lingkungan baru yang lebih kondusif untuk mengembangkan masyarakat Islam.

Ketika Nabi ﷺ tiba di Yatsrib, beliau disambut dengan suka cita oleh penduduk kota. Sambutan ini menandakan lahirnya sebuah masyarakat baru yang bersedia menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan. Sebelum resmi membangun struktur pemerintahan, Nabi terlebih dahulu meneguhkan fondasi *ukhuwwah* (persaudaraan) antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan musyawarah. Dari sinilah perlahan-lahan Madinah berkembang menjadi basis negara Islam pertama di bawah kepemimpinan langsung Rasulullah(Vachruddin, 2021).

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw. dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Islam. Hijrah tidak hanya bermakna perpindahan fisik dari satu kota ke kota lain, melainkan juga simbol transisi dari dakwah yang bersifat personal dan spiritual menuju pembentukan sebuah komunitas politik yang terorganisir. Di Madinah, Islam menemukan ruang yang lebih kondusif untuk berkembang, baik sebagai agama maupun sebagai sistem sosial-politik.

Madinah sendiri memiliki latar belakang sosial yang berbeda dengan Mekah. Jika Mekah dikenal sebagai pusat perdagangan dan agama dengan struktur oligarki Quraisy yang kuat, maka Madinah lebih bercorak agraris dengan masyarakat yang plural(Sairazi, 2019). Kota ini dihuni oleh dua kelompok besar bangsa Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang telah lama terlibat dalam konflik antarsuku. Di samping itu, terdapat pula komunitas Yahudi yang memiliki posisi ekonomi penting, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Kondisi masyarakat yang heterogen, dengan berbagai kepentingan dan potensi konflik, menuntut kehadiran figur pemersatu. Dalam konteks inilah, Nabi Muhammad Saw. hadir sebagai mediator sekaligus pemimpin yang mampu merangkul semua

pihak.

Salah satu langkah strategis Nabi di Madinah adalah menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen politik dan sosial yang mengatur hubungan antar kelompok dalam masyarakat Madinah. Piagam ini memuat prinsip-prinsip fundamental, seperti pengakuan atas keberagaman agama, jaminan kebebasan beribadah, serta kesepakatan untuk bersama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad Saw. berhasil membangun konsensus sosial yang menjadi dasar bagi lahirnya komunitas politik Islam. Hal ini menjadikan Madinah sebagai negara kota pertama yang berlandaskan nilai-nilai Islam, di mana otoritas politik dan moral berpadu dalam satu kepemimpinan(Nurmansyah, 2025).

Di bawah kepemimpinan Nabi, Madinah mengalami transformasi sosial yang signifikan. Ikatan kesukuan yang selama ini menjadi sumber konflik digantikan oleh ikatan keimanan (*ukhuwah islamiyyah*). Konsep *mu'akhah* atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial. Para Muhajirin yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah mendapatkan dukungan dari kaum Anshar yang rela berbagi sumber daya. Praktik ini menunjukkan bahwa Madinah bukan hanya menjadi pusat politik, tetapi juga laboratorium sosial di mana nilai- nilai Islam dipraktikkan secara nyata.

Selain membangun solidaritas internal, Nabi Muhammad Saw. juga menerapkan kebijakan luar negeri yang realistik. Hubungan dengan komunitas Yahudi, meskipun diwarnai dengan dinamika dan konflik, pada awalnya dikelola melalui kesepakatan bersama dalam Piagam Madinah. Sikap Nabi menunjukkan fleksibilitas politik yang berpijak pada prinsip keadilan, tetapi juga ketegasan ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Dalam konteks ini, Madinah memperlihatkan ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat, dengan kapasitas untuk mengatur hubungan internal maupun eksternal.

Puncaknya, Madinah menjadi basis kekuatan Islam dalam menghadapi dominasi Quraisy Mekah. Perang-perang besar seperti Badar, Uhud, dan Khandaq menunjukkan bahwa Madinah bukan sekadar tempat perlindungan, tetapi juga

pusat perlawanan yang strategis. Dari sinilah Islam kemudian meluaskan pengaruhnya ke seluruh Jazirah Arab. Dengan demikian, Madinah bukan hanya sebuah kota, melainkan simbol lahirnya negara Islam pertama yang berlandaskan syariat, solidaritas, dan kepemimpinan profetik(Marzuki et al., 2025).

Dengan terbentuknya Madinah sebagai basis negara Islam, dakwah Nabi Muhammad Saw. menemukan bentuk institusionalnya. Nilai-nilai tauhid, keadilan, persaudaraan, dan toleransi yang sebelumnya hanya menjadi ajaran normatif kini terwujud dalam realitas sosial-politik. Oleh karena itu, transformasi dari Mekah ke Madinah menandai lahirnya sebuah peradaban baru yang tidak hanya mengubah wajah masyarakat Arab, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi sejarah umat manusia.

Relevansi Model Kepemimpinan Nabi dengan Masa Kini

Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial, politik, dan moral. Sebagai Rasul sekaligus kepala negara di Madinah, beliau berhasil mengintegrasikan otoritas keagamaan dengan fungsi pemerintahan, sehingga menghadirkan model kepemimpinan yang unik dan komprehensif. Karakteristik kepemimpinan Nabi—yang berlandaskan pada keteladanan, musyawarah, keadilan, dan kedulian terhadap umat—menjadikannya relevan untuk dijadikan inspirasi dalam konteks kepemimpinan modern(Tyas, 2019).

Salah satu aspek penting dalam kepemimpinan Nabi adalah keteladanan (uswah hasanah). Rasulullah tidak hanya memberi perintah, tetapi juga terlebih dahulu mencontohkan dalam tindakan nyata. Dalam peperangan, misalnya, beliau tidak berada di belakang, melainkan turut berada di garis depan(Nabila & Masyhur, 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, beliau menampilkan kesederhanaan, kejujuran, dan konsistensi moral yang tinggi. Keteladanan semacam ini merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai moral authority(Iklan et al., 2024).

Selain keteladanan, prinsip musyawarah (syura) juga menjadi ciri khas kepemimpinan Nabi. Piagam Madinah mencerminkan semangat kolektif dalam

pengambilan keputusan, di mana berbagai kelompok masyarakat dilibatkan untuk menjaga stabilitas sosial-politik. Bahkan dalam urusan internal umat Islam, Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabat, seperti dalam strategi Perang Uhud atau Khandaq. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi bukan otoritarian, melainkan partisipatif, yang sejalan dengan prinsip demokrasi modern tentang pentingnya konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dimensi lain dari kepemimpinan Nabi adalah keadilan. Nabi Muhammad Saw. tidak membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, suku, atau kedekatan personal. Dalam suatu peristiwa, beliau menegaskan bahwa jika anaknya Fatimah mencuri, maka hukuman tetap harus ditegakkan sesuai aturan hukum(Andi, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan adalah nilai universal yang tidak boleh dikompromikan. Dalam konteks kepemimpinan kontemporer, prinsip ini relevan untuk menegakkan rule of law serta memberantas praktik nepotisme, kolusi, dan diskriminasi yang sering menjadi masalah dalam sistem politik modern.

Kepemimpinan Nabi juga menekankan empati dan kepedulian sosial. Beliau selalu hadir bagi kelompok lemah, seperti yatim, fakir miskin, dan budak. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Nabi sering berbagi makanan, memerdekaan budak, serta menekankan pentingnya solidaritas sosial. Kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat ini sangat relevan dengan konsep servant leadership dalam teori kepemimpinan modern, yakni pemimpin yang berfungsi melayani, bukan dilayani(Shihabuddin et al., 2024).

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang sarat tantangan, model kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. tetap memberikan pelajaran berharga. Tantangan kepemimpinan masa kini, seperti krisis moral, ketidakadilan sosial, konflik identitas, dan korupsi, dapat direspon dengan mengadopsi nilai-nilai kepemimpinan profetik (berdasar pada nilai-nilai kenabian). Musyawarah dapat menjadi dasar demokrasi partisipatif, keadilan menjadi pedoman dalam hukum dan kebijakan publik, keteladanan moral menjadi benteng dari krisis integritas, sementara kepedulian sosial menjadi jawaban atas kesenjangan ekonomi yang

kian melebar(Hamdi, 2023).

Dengan demikian, relevansi model kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sebatas dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga dalam kerangka universal kemanusiaan. Kepemimpinan yang berpijak pada moralitas, keadilan, partisipasi, dan pelayanan publik merupakan model yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat global saat ini. Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berhasil membangun sebuah negara di Madinah, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang terus hidup dan dapat dijadikan inspirasi lintas zaman(Ilmi et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi dakwah Nabi Muhammad Saw. dari Mekah ke Madinah merupakan proses perubahan sosial-politik yang bersifat gradual, kontekstual, dan strategis. Dakwah pada fase Mekah berfungsi sebagai gerakan transformasi moral dan sosial yang menggugat struktur kesukuan, ketimpangan sosial, serta legitimasi kekuasaan elit Quraisy, sekaligus membangun fondasi ideologis bagi lahirnya komunitas Muslim. Fase Madinah menandai institisionalisasi dakwah tersebut melalui pembentukan masyarakat politik yang plural dan terorganisasi, dengan Piagam Madinah sebagai kerangka normatif yang mengatur relasi sosial, politik, dan hukum secara inklusif.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosial-politik Islam dengan menawarkan pembacaan sosio-historis atas dakwah Nabi Muhammad Saw. yang melampaui pendekatan normatif-teologis dan narasi sejarah deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi tidak dapat dipisahkan dari dinamika struktur sosial dan relasi kekuasaan, serta berperan sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, artikel ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara agama, perubahan sosial, dan kepemimpinan dalam konteks Islam awal.

Implikasi akademik dari temuan ini terletak pada relevansi model kepemimpinan profetik sebagai kerangka analitis dalam studi kepemimpinan dan tata kelola sosial-politik kontemporer. Prinsip keteladanan moral, musyawarah,

keadilan, dan kepedulian sosial yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. dapat dipahami sebagai nilai universal yang dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat modern yang plural dan demokratis.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bergantung pada sumber kepustakaan, khususnya literatur klasik dan kajian sekunder, sehingga analisis sangat bergantung pada interpretasi teks dan konteks historis yang tersedia. Selain itu, pendekatan sosio-historis yang digunakan belum secara mendalam mengintegrasikan teori-teori sosial kontemporer sebagai kerangka analisis utama.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan interdisipliner, seperti mengombinasikan analisis sosio-historis dengan teori perubahan sosial, teori kepemimpinan, atau studi politik komparatif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji relevansi model dakwah dan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang lebih beragam, baik melalui studi empiris maupun analisis komparatif lintas budaya dan sistem politik.

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Dinamika Peradaban Islam atas bimbingan, arahan, dan masukan akademik yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada para peneliti dan penulis karya ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, sehingga memperkaya analisis historis dan sosiologis yang disajikan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah dan pemikiran sosial-politik Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Andi, S. (2023). Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Persepektif Hadis Nabi (kajian Sosio Historis-Kontekstualis). *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 5(1), 20–38. <https://doi.org/10.55656/kisj.v5i1.90>
- Arzam. (2016). Hukum Islam Sebagai Revolusioner Dan Egaliter Dalam Kehidupan Sosial. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.8>
- Azizah, S. S., & Yudhistira, D. (2025). Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam. *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics*, 4(1), 21–29. <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download/25616/14511/81899>
- Azzahra, K., Harahap, N. I., Triansyah, H., & Marzuki. (2025). Gerakan Sosial Keagamaan Dan Politik Era Mekkah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 918–926. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1663>
- Hamdi, M. R. (2023). Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Dan Konsep Politik Profetik. *Al- Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 34–52. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Hidayatulloh, M. A. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(1), 1193–1202. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/705/516>
- Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka*, 8(1), 86–98. <https://jurnal.aripafi.or.id/index.php/jbpai>
- Iklan, D., Publik, P., & Hadits, P. (2024). Prinsip Kejujuran, Transparansi, Dan Kesederhanaan Dalam Iklan Pelayanan Publik Perspektif Hadits Nabi Muhammad Saw. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(2), 211–222.
- Ilmi, R., Artika, L., & Marzuki. (2025). Relevansi Sirah Nabawiyah dalam Konteks Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 170–179.
- Kamila, A. N., Yusniati, N., Al Fahmi, F. F., Irham, M., Hudzaifah, A., & Nabila, F. (2025). Revolusi Sosial di Mekkah: Jejak Dakwah Rasulullah SAW dalam Mengubah Peradaban. *SWADESI : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 1(4), 59–70.
- Marzuki, Rafly, M., & Sadri, K. (2025). Perang – Perang Besar Dalam Islam (the Great Wars in Islam). *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusanatara*, 2(3), 2274–2282. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Nabila, A., & Masyhur, L. S. (2025). *Analisis Keteladanan Nabi Muhammad Saw*

- Dalam Perang Uhud (Perspektif Al-Qur'an). 10(4).
- Nurmansyah, A. R. (2025). Piagam Madinah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2), 270–275.
- Rahmatulloh, Y., Iqbal, M., Fardan, A., & Rahmatullah, S. (2025). Fenomena Tren Hijrah Keberagaman di Kalangan Gen Z: Studi Fenomenologi Kecenderungan terhadap Corak Dakwah Sufisme dan Salafisme. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 339–358. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai>
- Rizqi, M. A., & Alamudi, A. K. (2025). Analisis Kepemimpinan Islami Pada Era Modern. *Jurnal Manajerial*, 12(No. 02), 319. <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9782>
- Saepuloh, E., Satmita, G. P., Permata, G. I., Masripah, Zuhri, M. T., & Munawaroh, N. (2025). Pemikiran Dan Peradaban: Arab Pra-Islam Dan Munculnya Peradaban Pada Masa Nabi Muhammad Saw. *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan*, 6(2), 147–158.
- Sairazi, A. H. (2019). Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1), 119–146.
- Shihabuddin, A., Putra, R. M., & Andriani, T. (2024). Kepemimpinan Kenabian dalam Konteks Kontemporer : Analisis Konsep, Praktik, dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5659–5673.
- Tyas, N. R. (2019). Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad Saw. *Muslim Heritage*, 4(2), 261–279. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1851>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Wahdania, & Rahmawati. (2025). Metode Pendekatan Nabi Muhammad dalam Mengajak Umatnya di Mekkah dan di Madinah Menjadi Pengikutnya. *Jurnal Mudabbir (Journal Research And Education Studies)*, 5(2), 2935–2955.